

## FAKTOR PENGHAMBAT PENERAPAN SISTEM PROFIL DESA DAN KELURAHAN (PRODESKEL) DI KECAMATAN GIRI

Oleh:

Nur Syaida<sup>1</sup>, Leni Vitasari<sup>2</sup>, Niko Pahlevi Hentika<sup>3</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Banyuwangi, Jawa Timur

Email: syaidanur11@gmail.com

### ABSTRACT

*This study investigates the inhibiting factors in the implementation of the Village and Sub-District Profile System (Prodeskel) in Giri Subdistrict, Banyuwangi Regency. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, observations, and document analysis. The analysis refers to the six dimensions of policy implementation barriers proposed by Warwick (1979), namely: magnitude of change, number of actors involved, number of decision points, alternative commitments or preferences, intrinsic complexity, and timing. Findings indicate that three of these dimensions significantly hinder the process. First, overlapping responsibilities especially in urban administrative units cause operators to deprioritize Prodeskel tasks (alternative commitments). Second, technical challenges such as slow system performance and login issues (intrinsic complexity) reduce efficiency and data accuracy. Third, a limited time frame particularly for sub-districts, which only receive about one month for data entry constrains the overall implementation (timing). On the other hand, the other three dimensions organizational change, actor involvement, and decision-making structures were not identified as barriers, as coordination across stakeholders was smooth and decisions were made in a direct, administrative manner. This study suggests the importance of optimizing time management, enhancing technical infrastructure, and distributing tasks more equitably to ensure accurate and consistent data reporting at the local government level.*

*Keywords: Prodeskel, E-Government, Barriers, Policy Implementation.*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penghambat dalam implementasi Sistem Profil Desa dan Kecamatan (Prodeskel) di Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Analisis merujuk pada enam dimensi hambatan implementasi kebijakan yang diusulkan oleh Warwick (1979), yaitu: skala perubahan, jumlah aktor yang terlibat, jumlah titik keputusan, komitmen atau preferensi alternatif, kompleksitas intrinsik, dan waktu. Temuan menunjukkan bahwa tiga dari dimensi tersebut secara signifikan menghambat proses. Pertama, tumpang tindih tanggung jawab, terutama di unit administratif perkotaan, menyebabkan operator memprioritaskan

tugas lain daripada Prodeskel (komitmen alternatif). Kedua, tantangan teknis seperti kinerja sistem yang lambat dan masalah login (kompleksitas intrinsik) mengurangi efisiensi dan akurasi data. Ketiga, batas waktu yang terbatas, terutama bagi kecamatan, yang hanya mendapatkan sekitar satu bulan untuk penginputan data, membatasi implementasi secara keseluruhan (waktu). Di sisi lain, tiga dimensi lainnya perubahan organisasi, keterlibatan aktor, dan struktur pengambilan Keputusan tidak diidentifikasi sebagai hambatan, karena koordinasi antar pemangku kepentingan berjalan lancar dan keputusan diambil secara langsung dan administratif. Studi ini menyarankan pentingnya mengoptimalkan manajemen waktu, meningkatkan infrastruktur teknis, dan mendistribusikan tugas secara lebih adil untuk memastikan pelaporan data yang akurat dan konsisten di tingkat pemerintah daerah.

Kata Kunci: Prodeskel, E-Government, Faktor Penghambat, Implementasi Kebijakan.

## **I. PENDAHULUAN**

Pembangunan desa merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan taraf kehidupan demi kesejahteraan masyarakat desa secara maksimal. Untuk memenuhi hal tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota (Izzuddin et al., 2023; Septiani, 2022). Tujuan pembangunan desa telah disebutkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat 1, yang menyatakan “Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 78 ayat 2 disebutkan bahwa terdapat tiga tahap dalam proses pembangunan desa, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahap perencanaan merupakan langkah awal yang krusial dalam merumuskan visi, misi, serta program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Selanjutnya, tahap pelaksanaan merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun, ketika program pembangunan diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata yang melibatkan partisipasi masyarakat. Tahap terakhir, pengawasan, berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala yang mungkin timbul.

Dalam upaya mendorong efektivitas pembangunan di tingkat lokal, ketersediaan data yang akurat dan terstruktur menjadi kebutuhan mendasar. Salah satu instrumen yang dikembangkan untuk mendukung kebutuhan tersebut adalah sistem Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel). Sistem ini berfungsi sebagai basis informasi yang mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan potensi wilayah, serta menjadi alat bantu dalam proses perencanaan yang lebih partisipatif (Rahman et al., 2024).

Menurut data dari E-Prodeskel tahun 2024, sebanyak 76% dari total desa dan kelurahan di Indonesia telah berhasil mengisi data Prodeskel (E-Prodeskel, 2024). Meskipun angka ini menunjukkan adanya upaya signifikan dalam pengumpulan data di tingkat lokal, persentase tersebut masih dianggap rendah, terutama mengingat program Prodeskel telah berjalan lebih dari satu dekade. Artinya, meski program ini telah lama dilaksanakan, belum semua desa dan kelurahan mampu atau konsisten dalam melengkapi data profilnya. Rendahnya tingkat pengisian ini menandakan adanya tantangan yang belum sepenuhnya teratasi, baik dari segi teknis, sumber daya manusia, maupun dukungan pendanaan untuk memastikan data ter-input dengan baik.

Meskipun pemerintah telah mendorong pemanfaatan sistem ini melalui platform digital yang terintegrasi sebagai bagian dari penerapan *e-government*, namun implementasinya di berbagai wilayah belum menunjukkan hasil yang seragam. Perbedaan dalam tingkat keakuratan dan kelengkapan data masih sering ditemukan, yang berdampak pada kurang maksimalnya data sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan desa dan kelurahan (Isnaini et al., 2023; Putra & Parwata, 2013). Kondisi ini juga tampak di beberapa wilayah yang memiliki komitmen terhadap pengelolaan data namun masih menghadapi kendala teknis maupun administratif. Terdapat situasi di mana data telah diinput, namun belum diperbarui secara berkala, atau bahkan diisi secara tidak menyeluruh. Keadaan semacam ini menandakan bahwa selain kesadaran kesadaran dari pihak pengelola data, yaitu aparat desa atau kelurahan atau operator Prodeskel, masih ada tantangan lain yang belum terselesaikan sepenuhnya (Farhana et al., 2023; Sari et al., 2022).

Di Kabupaten Banyuwangi, persentase pengisian data Prodeskel tahun 2024 tercatat mencapai 90% (E-Prodeskel, 2024), capaian ini mencerminkan upaya serius pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mendorong desa dan kelurahan untuk melengkapi data Prodeskel melalui platform E-Prodeskel. Angka tersebut juga menjadi bukti bahwa Banyuwangi memiliki komitmen kuat terhadap tata kelola data desa yang lebih baik. Namun, meskipun angka ini menggembirakan, masih ada 10% desa atau kelurahan yang belum sepenuhnya menyelesaikan

pengisian data. Selain itu, Ketika ditinjau lebih lanjut, terdapat beberapa desa dan kelurahan yang tidak konsisten dalam pengisian data. Hal ini terlihat dari beberapa desa yang pada tahun-tahun sebelumnya telah mengisi data secara lengkap, namun pada tahun berikutnya tidak lagi melakukannya. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan adanya tantangan berkelanjutan dalam penerapan Prodeskel.

## II. METODE

Peneliti menerapkan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti berpedoman pada pemikiran Warwick tentang faktor penghambat implementasi (*impeding conditions*) yaitu: besarnya perubahan (*magnitude of change*), jumlah pihak yang terlibat (*number of actors involved*), komitmen alternatif atau preferensi (*alternative commitments or preferences*), kompleksitas intrinsik (*intrinsic complexity*), jumlah titik keputusan (*number of decision points*), waktu (*timing*) yang ditinjau berdasarkan informasi secara rinci terkait kendala dalam penerapan Prodeskel di Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi.

Data primer didapatkan melalui metode wawancara dengan informan yang ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* (Siswadi, 2024). Teknik ini digunakan untuk menetapkan informan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, peneliti menetapkan perangkat desa atau staf dari masing-masing desa dan kelurahan di Kecamatan Giri yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pengisian atau penerapan Sistem Prodeskel. Adapun data sekunder merupakan hasil kajian pustaka serta data yang sudah ada yang memiliki relevansi dengan substansi penelitian (Hardani et al., 2020; Sugiyono, 2020).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 E-Government Sebagai Elemen Pendukung Pembangunan Keberlanjutan

*E-government* merupakan pendekatan modern dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik (Setiawan et al., 2023). Melalui penerapan sistem digital, interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, pelaku usaha, serta antar lembaga pemerintahan dapat dilakukan secara lebih cepat, terbuka, dan terintegrasi. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mempermudah proses administrasi, tetapi juga mendorong keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan serta pengawasan kebijakan (Harjanti, 2020; Yuningsih & Saefulrahman,

2020). Penerapan *e-government* mencakup berbagai bentuk layanan, mulai dari informasi yang disampaikan melalui situs resmi pemerintah, pengajuan dokumen secara daring, hingga sistem pengelolaan data yang mendukung perencanaan pembangunan. Dengan adanya *e-government*, diharapkan pemerintah mampu membangun tata kelola yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan yang responsif dan akuntabel (Budiman, 2019; Diana et al., 2024).

Penerapan *e-government* terbagi ke dalam empat bentuk utama yang mencerminkan jenis hubungan digital dalam pemerintahan. Pertama, G2C (*Government to Citizen*) berfokus pada pelayanan publik yang diberikan langsung kepada masyarakat, seperti akses informasi dan administrasi kependudukan secara daring. Kedua, G2B (*Government to Business*) berkaitan dengan interaksi pemerintah dengan sektor usaha, misalnya dalam pengurusan perizinan atau lelang proyek. Ketiga, G2G (*Government to Government*) menjembatani komunikasi dan pertukaran data antarinstansi pemerintahan untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi kerja birokrasi. Terakhir, G2E (*Government to Employee*) ditujukan untuk mendukung manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintahan, termasuk pengelolaan hak dan kewajiban aparatur sipil negara. Keempat bentuk ini merepresentasikan bagaimana teknologi dapat memperkuat hubungan fungsional di dalam dan di luar sistem pemerintahan (Junarto et al., 2023; Setiawan et al., 2023).

*E-Government* dalam penelitian ini mengacu pada implementasi sistem Prodeskel yang dirancang untuk menghimpun dan menyajikan data strategis mengenai kondisi sosial, ekonomi, demografis, serta potensi sumber daya di wilayah desa dan kelurahan. Sistem ini berfungsi sebagai alat bantu pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan berbasis data faktual, serta menjadi acuan dalam menetapkan prioritas program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Dako & Ilham, 2020; Zuliyanto et al., 2024). Melalui Prodeskel, pemerintah daerah dapat memperoleh data yang lebih terstruktur dan terkini, yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat (Achsin et al., 2015; Lorenza, 2022). Pemanfaatan sistem ini juga mencerminkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis digital, sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dari tingkat paling dasar. Ditemukan kesenjangan hasil implementasi pada masing-masing desa dan kelurahan di Kecamatan Giri.

### 3.2 Identifikasi Faktor Penghambat Implementasi Berdasarkan Pemikiran Warwick (1979)

Warwick, dalam *transactional model* yang dikemukakannya pada tahun 1979, menyoroti bahwa implementasi suatu kebijakan atau program sering kali menghadapi berbagai hambatan. Ia mengidentifikasi sejumlah faktor utama yang dapat menghambat proses implementasi dan merancang kerangka untuk memahami bagaimana hambatan ini bekerja dalam konteks lingkungan sosial, politik, dan birokrasi. Beberapa aspek yang dapat menghambat implementasi menurut Warwick (1979) yaitu: besarnya perubahan (*magnitude of change*), jumlah pihak yang terlibat (*number of actors involved*), komitmen alternatif atau preferensi (*alternative commitments or preferences*), kompleksitas intrinsik (*intrinsic complexity*), jumlah titik keputusan (*number of decision points*), dan waktu (*timing*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para staf desa dan kelurahan yang berkaitan langsung dengan penerapan sistem Prodeskel di Kecamatan Giri, peneliti mendapati berbagai kendala yang mereka hadapi sehingga menghambat berjalannya sistem Prodeskel. Sebagaimana pemikiran Warwick (1979), dimensi pertama yang menjadi penghambat adalah besarnya perubahan (*magnitude of change*). Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa dari enam desa dan kelurahan di Kecamatan Giri, hanya Kelurahan Giri yang terhambat perubahan struktur organisasi. Operator Prodeskel Kelurahan Giri mengungkapkan bahwa ia sebagai operator baru belum sepenuhnya memahami sistem Prodeskel, sehingga proses pembaruan data mengalami keterlambatan dan tidak berjalan lancar. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan pelaksanaan Prodeskel sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kompetensi sumber daya manusia. Tanpa adanya pendampingan atau pelatihan yang memadai bagi operator baru, proses input data rentan mengalami gangguan.

Dimensi berikutnya jumlah pihak yang terlibat (*number of actors involved*) yang terdiri dari tiga indikator yaitu pertama, jumlah pihak atau organisasi yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pihak yang terlibat di desa tidak serta-merta menjadi hambatan, justru dapat menjadi keuntungan jika dikelola dengan baik. Keterlibatan lebih banyak pihak di desa dapat mempercepat proses pengumpulan dan verifikasi data karena tugas dapat didistribusikan secara lebih merata. Sebaliknya, di kelurahan yang melibatkan lebih sedikit pihak, proses bisa berjalan lebih sederhana namun berisiko lambat jika beban kerja tidak terdistribusi dengan baik. Indikator kedua yakni Komunikasi antar pihak atau organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keenam desa dan kelurahan di Kecamatan Giri mengungkapkan bahwa komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengumpulan data Prodeskel berjalan dengan lancar dan tanpa

hambatan berarti. Indikator ketiga yakni kesulitan koordinasi antar instansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Giri menyampaikan bahwa proses koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pengumpulan data Prodeskel berlangsung dengan baik. Tidak ditemukan adanya kendala berarti dalam menjalin kerja sama.

Selanjutnya dimensi komitmen alternatif atau preferensi (*alternative commitments or preferences*) yang terdiri dari dua indikator yaitu pertama adanya program, tujuan atau prioritas lain. Hasil penelitian menunjukkan dari empat desa dan dua kelurahan di Kecamatan Giri, mayoritas kelurahan mengalami hambatan dalam penerapan Sistem Prodeskel akibat tumpang tindihnya beban pekerjaan. Kelurahan Mojopanggung, Penataban, Giri, dan Boyolangu, melaporkan bahwa keterbatasan waktu dan banyaknya tugas lain yang harus diselesaikan menjadi faktor penghambat dalam pengisian data Prodeskel. Hal ini mencerminkan bahwa sumber daya manusia di kelurahan cenderung lebih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kapasitas, sehingga kesulitan dalam membagi fokus antara Prodeskel dan tugas administratif lainnya. Di sisi lain, Desa Grogol dan Jambesari tidak mengalami hambatan serupa. Hal ini disebabkan oleh adanya lebih banyak aktor atau pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Prodeskel di tingkat desa. Indikator kedua yaitu keterbatasan kekuasaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Seluruh informan dari enam desa dan kelurahan mengaku tidak mengalami keterbatasan kekuasaan dalam menerapkan Sistem Prodeskel.

Dimensi kompleksitas intrinsik (*intrinsic complexity*) terdiri dari tiga indikator yaitu pertama, kompleksitas teknis atau sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam desa dan kelurahan, lima di antaranya mengaku mengalami kendala teknis dalam penggunaan sistem Prodeskel. Kelima wilayah tersebut adalah: Kelurahan Mojopanggung, Kelurahan Penataban, Kelurahan Giri, Kelurahan Boyolangu, dan Desa Grogol. Kelima wilayah tersebut menyatakan bahwa sistem Prodeskel lemot (lambat), dan beberapa juga menyebutkan bahwa proses login sulit dilakukan. Sementara itu, hanya Desa Jambesari yang tidak mengeluhkan masalah apa pun terkait sistem Prodeskel.

Indikator kedua dalam dimensi *intrinsic complexity* yaitu anggaran, hasil penelitian menjelaskan bahwa Terdapat perbedaan dukungan anggaran antara desa dan kelurahan di Kecamatan Giri dalam pelaksanaan Prodeskel. Di tingkat desa, baik Desa Grogol maupun Desa Jambesari memiliki anggaran khusus untuk mendukung pengisian Prodeskel. Sementara itu, di tingkat kelurahan, tidak terdapat anggaran khusus. Hanya Kelurahan Boyolangu dan Kelurahan

Giri yang memberikan honor atau tip setelah pengisian Prodeskel selesai kepada operator Prodeskel. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan terkait kebutuhan anggaran. Kelurahan Giri dan Kelurahan Boyolangu menyatakan bahwa Prodeskel memerlukan anggaran, sedangkan Kelurahan Mojopanggung dan Kelurahan Penataban menyatakan bahwa Prodeskel tidak memerlukan anggaran khusus.

Indikator ketiga dalam dimensi *intrinsic complexity* yaitu sumber daya manusia, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam desa dan kelurahan di Kecamatan Giri, seluruhnya menyatakan telah memiliki sumber daya manusia yang baik dalam menerapkan Prodeskel. Namun, berdasarkan hasil penelitian, terdapat satu kelurahan yang masih mengalami kendala dalam hal sumber daya manusia dalam pelaksanaan Prodeskel, yaitu Kelurahan Mojopanggung. Hal ini terlihat dari rendahnya pemahaman operator kelurahan tersebut dalam memahami prosedur pengisian Prodeskel yang benar. Ini menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan untuk peningkatan kapasitas atau pelatihan teknis di wilayah tersebut agar pelaksanaan Prodeskel dapat berjalan lebih optimal.

Dimensi berikutnya adalah jumlah titik keputusan (*number of decision points*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terjadi proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Prodeskel di Kecamatan Giri. Ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan Prodeskel berjalan secara sederhana atau sifat kegiatannya memang tidak memerlukan banyak pertimbangan atau persetujuan dari berbagai pihak. Prodeskel lebih bersifat teknis dan administratif, sehingga dapat langsung dikerjakan oleh petugas tanpa melalui tahapan keputusan yang kompleks.

Dimensi terakhir yaitu waktu (*timing*) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa desa-desa di Kecamatan Giri mendapatkan waktu pengisian data selama kurang lebih enam bulan. Waktu yang cukup panjang ini membuat pihak desa tidak mengalami kendala berarti dalam menyelesaikan proses pengisian. Sebaliknya, kelurahan hanya memiliki waktu sekitar satu bulan untuk menyelesaikan tugas yang sama. Akibatnya, hampir semua kelurahan kecuali Kelurahan Mojopanggung mengaku bahwa keterbatasan waktu menjadi hambatan dalam pelaksanaan Prodeskel, karena waktu yang tersedia dirasa tidak sebanding dengan beban kerja yang harus diselesaikan.

#### IV. SIMPULAN

Pelaksanaan Sistem Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) di Kecamatan Giri belum berjalan secara optimal, terutama di wilayah kelurahan. Hambatan utama yang diidentifikasi mencakup beban kerja ganda, keterbatasan waktu pelaksanaan, kendala teknis sistem, minimnya dukungan anggaran, serta rendahnya kapasitas awal operator baru. Sementara itu, desa seperti Grogol dan Jambesari menunjukkan kinerja yang relatif stabil, didukung oleh struktur organisasi yang lebih mapan, pelibatan banyak pihak, serta koordinasi internal yang efektif. Faktor-faktor yang menghambat, jika dianalisis melalui pendekatan teori Warwick (1979), banyak ditemukan pada dimensi *intrinsic complexity*, *timing*, dan *alternative commitments or preferences*. Namun, dimensi lain seperti *number of actors involved* dan *number of decision points* tidak menjadi kendala yang berarti karena hubungan kerja antar aktor berlangsung cukup lancar.

Berdasarkan temuan tersebut, peningkatan kapasitas operator Prodeskel melalui pelatihan teknis dan pendampingan secara berkala menjadi sangat penting, terutama untuk wilayah yang mengalami pergantian struktur organisasi. Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan redistribusi beban kerja dan penyesuaian alokasi waktu bagi kelurahan, agar pelaksanaan program tidak berbenturan dengan tugas-tugas administratif lainnya. Selain itu, diperlukan kebijakan yang mendorong alokasi anggaran khusus untuk mendukung proses input dan validasi data Prodeskel, terutama bagi wilayah kelurahan yang selama ini cenderung mengandalkan inisiatif internal. Penguatan koordinasi lintas sektor dan pelibatan lebih banyak pihak di tingkat lokal juga dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan keberlanjutan dan akurasi pelaksanaan sistem ini dalam jangka panjang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achsin, S. N., Cangara, H., & Unde, A. A. (2015). Profil Desa Dan Kelurahan Sebagai Sumber Informasi: Studi Evaluasi Tentang Penyediaan Informasi Potensi Desa Dan Kelurahan Di Sulawesi Selatan Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan (BPMPDK) Provinsi Sulawesi Selatan. *KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.31947/kjik.v4i4.649>
- Budiman, E. (2019). E-Government Data Profil dan Monografi Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. *JTRISTE*, 3(1), 49–58.
- Dako, A. Y., & Ilham, J. (2020). Pemberdayaan Aparat Pemerintah Desa Huntulohulawa Kecamatan Bongomeme Dalam Revitalisasi Data Profil Desa Dengan Optimasi Dukungan Manajemen Berbasis Web. *Jurnal Abdimas Gorontalo (JAG)*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30869/jag.v3i1.526>

- Diana, B. A., Sunarya, A., & Harta, R. (2024). Kajian Pelaksanaan E-Government pada Pemerintahan Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(1), 181–194. <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i1.3032>
- Farhana, F., Muis, A., & Rofieq, A. (2023). Pelatihan Sistem Administrasi Pendataan Penduduk Melalui Website Prodeskel Desa Sindangsari Kabupaten Bekasi. *An Nizam : Jurnal Bakti Bagi Bangsa*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33558/an-nizam.v2i2.6125>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group.
- Harjanti, I. M. (2020). Penyusunan Profil Desa Sebagai Upaya Pembaharuan Data Di Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 1(3), 210–214. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jpv.2020.7324>
- Isnaini, N., Roemintoyo, R., & Sukmawati, F. (2023). Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Sebagai Media Informasi Desa. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.28469>
- Izzuddin, A., Janah, F. W., Zamzam, S. N., & Sugianto, N. (2023). Bentuk Kegiatan Pembelajaran Proyek Desa Dalam Program SIMONTING, PRODESKEL, EPDESKEL dan Ekonomi Desa di Kecamatan Puger. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32528/manage.v4i01.274>
- Junarto, R., Salim, M. N., & Wulansari, H. (2023). Pembaharuan Data Profil Desa Bumirejo Sebagai Dasar Menetapkan Sasaran Program Pembangunan Desa. *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Pendidikan*, 3(2), 90–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jurnalinovasi.v3i2.26485>
- Lorenza, T. (2022). *Pelaksanaan Program Administrasi Kelurahan Terhadap Penyusunan Data Profil Kelurahan di Kota Bandar Lampung (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung)*. Universitas Lampung.
- Putra, P. G. K. W., & Parwata, I. G. N. (2013). Pelaksanaan Program Data Profil Desa Dan Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar). *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 1(6).
- Rahman, N. F., Manar, D. G., & Setiyono, B. (2024). Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Dalam Upaya Mewujudkan Smart Village (Desa Kalisidi Kabupaten Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 13(1), 15–30.
- Sari, D. N., S, I. A. P. A., Saputra, R. H., Kusnadi, D., & Hendrawan, E. (2022). Pendampingan Penginputan Data Keluarga ke Dalam Aplikasi Prodeskel Pekon Sumber Rejo Kabupaten Pringsewu. *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 34–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.34148/komatika.v2i2.564>
- Septiani, A. R. (2022). Implementasi Aplikasi Profil Desa Dan Kelurahan (PRODESKEL) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Barat. *Berkala Mahasiswa Administrasi Bisnis*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31573/bimanis.v1i1.57>
- Setiawan, A., Halimah, M., & Faidah, R. N. (2023). Implementasi E-Government Berbasis Situs Web. *Indonesian Journal of Education and Social Sciences*, 2(1), 7–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.56916/ijess.v2i1.353>
- Siswadi, G. A. (2024). *Persepsi Siswa Terhadap Mata Pelajaran Agama Hindu di SMAN 8 Denpasar*. *Jawa Dwipa*, 5(2), 1-22

- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta.
- Yuningsih, N. Y., & Saefulrahman, I. (2020). Pemutakhiran Data Profil Dan Potensi Desa Berbasis Data Dasar Keluarga. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33061/awpm.v4i1.3321>
- Zuliyanto, E., Muzakkir, & Rahman, D. (2024). Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) untuk Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Desa Lando Lombok Timur. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.70004/dedikasi.v4i02.155>